

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
KE PEMERINTAH KOTA BANDUNG
8 – 10 MEI 2017**

I.	Dasar Pelaksanaan	:	1 2 3	<p>Dokumen Pelaksanaan Kegiatan-DIPA Nomor MA 002.01.001012.01.51.11.5799.001.001.052A.524111</p> <p>Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.</p> <p>Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Keahlian DPR RI No. BK/00809/SETJEN/PN/01/2017, Tanggal 17 Januari 2017.</p> <p>SPPD No. 01/ST/PKAKN/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017, An.</p> <ul style="list-style-type: none"> • K. Johnson Rajagukguk • Helmizar • Rini Koentarti • Djustiawan Widjaya • AgengWardoyo • Sukmalalana • M. Aaqil Imama • Pandu Narendradewo • Sindi Meida R. • Sekar Aditya Dwikirana • Syandi Negara • Eri Fareza • Gunarso B. Suwarno
II.	Maksud Perjalanan Dinas	:	-	Menganalisis pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual pada LKPD TA 2015 dan 2016, pengumpulan data serta informasi yang dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
III.	Dinas/Instansi yang dikunjungi	:	- - -	<p>BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat</p> <p>BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Bandung</p>
IV.	Waktu Pelaksanaan	:	-	Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8-10 Mei 2017
V.	Hasil			Kunjungan yang dilakukan oleh Tim PKAKN ke Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD TA 2015.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Arman Syifa, selaku Kepala Perwakilan. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah pemeriksaan kinerja dilaksanakan pada 6 (enam) Entitas yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual pada LKPD untuk Pemda yang telah memperoleh opini WTP (20 entitas), (7 entitas), TMP (1 entitas), Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Temuan signifikan terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual pada LKPD, Pemda belum melakukan analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan TI dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada setiap OPD, dan juga Pemda belum melakukan optimalisasi SDM secara memadai, retribusi SDM yang belum sepenuhnya mempertimbangkan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Serta dalam aspek pengelolaan teknologi informasi, sistem aplikasi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan implementasi SAP berbasis akrual, karena masih menggunakan pengelolaan data secara manual, dan belum ada SOP untuk mengintegrasikan data antar sistem aplikasi tersebut.
- Kendala yang dihadapi terkait 3 key area pemeriksaan :
 1. Kendala di area kelembagaan, penataan SOTK terkait tugas dan fungsi akuntan pada SKPD dan PPKD belum mendukung penerapan SAP berbasis akrual, dan secara regulasi terdapat ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di bidang pengelola keuangan daerah.
 2. Kendala SDM , terdapat 3 faktor yaitu pertama kuantitas, meliputi jumlah SDM PNSD di bidang akuntansi, aset daerah dan IT belum memadai, kedua kompetensi, belum ada peningkatan kompetensi tenaga akuntansi, ketiga komitmen, KDH dan DPRD maupun aparatur Pemda belum berkomitmen dalam upaya peningkatan transparansi tata kelola akuntabilitas keuangan negara.
 3. Kendala pengelolaan TI, meliputi pemamfaatan teknologi yang belum memadai, dan pemda belum melakukan customizing aplikasi dari basis kas menuju akrual untuk memenuhi SAP berbasis akrual.
- Peran BPK dalam keberhasilan pelaksanaan SAP berbasis akrual, BPK telah melakukan review atas kesiapan pemda beberapa tahun sebelum pelaksanaan ASP akrual di tahun 2015. Review tersebut melekat dalam pemeriksaan LKPD setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan kinerja SAP Akruual juga didiseminasikan kepada entitas yang tidak menjadi sampel pemeriksaan agar mereka dapat memperbaiki kelemahan yang ada di entitasnya.

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kunjungan ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui diskusi terkait dengan kajian yang bertema “Pelaksanaan dan Kendala Penerapan SAP Berbasis Akruual Pada LKPD TA 2015 Serta Persiapan Penerapan Basis Akruual TA 2016”

Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Menurut BPKP, Tahun 2015 adalah momentum penerapan SAP berbasis akrual secara penuh.
- Perolehan opini WDP selama lima tahun berturut-turut oleh Kota Bandung disebabkan penatausahaan aset yang belum tertib.
- Penyebab diberikannya opini TMP untuk Kabupaten Subang disebabkan karena adanya aturan-aturan lama yang tidak sinergis dengan program-program terbaru. Masalah tersebut saat ini sedang dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui revisi peraturan dan regulasi daerah.
- Penyebab kota-kota besar seperti Bogor, Bandung dan Tasikmalaya belum mendapatkan opini WTP sebagian besar dikarenakan oleh nilai tanah dan aset tinggi ditambah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan kesulitan dalam penghitungan aset karena jumlahnya sangat banyak.

Secara garis besar BPKP sudah mengawal penerapan SAP berbasis Akrual di Jawa Barat dengan memberikan sosialisasi tata cara pengolahan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan dan barang yang sudah diberikan secara gratis. Namun hal ini menjadi kurang efektif karena seringkali ditolak oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan alasan mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan. Meskipun tidak ada paksaan untuk menggunakan SIMDA, penggunaan jasa konsultan menimbulkan kesulitan dalam keberlanjutan sistem, terutama terkait dengan masalah *knowledge sharing*.

Sebagai catatan, BPKP Perwakilan Jawa Barat menekankan bahwa akuntabilitas kinerja jauh lebih penting daripada akuntabilitas laporan keuangan karena lebih merefleksikan komitmen pengabdian dan pelayanan terhadap publik terhadap masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung

Dalam pertemuan dengan Pemkot Bandung, Tim PKAKN diterima oleh Koeswara, selaku Kepala Inspektorat Kota Bandung. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual, Pemkot Bandung telah menerapkan SAP berbasis akrual sejak tahun anggaran 2015 dengan menggunakan aplikasi SIMDA yang mana telah dijadikan pusat penerapan SIMDA oleh BPKP sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Terkait aspek regulasi, Kepala Daerah telah menyusun peraturan kepala daerah yaitu Perwalkot 528 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Perwalkot 529 tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Terkait Aspek SDM, Pemkot Bandung telah melakukan BIMTEK dan sosialisasi kepada pejabat dan staf. Terkait aspek IT, Pemkot Bandung telah menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.
- Pemkot Bandung memiliki dukungan anggaran terhadap penerapan SAP berbasis akrual, salah satunya dalam bentuk alokasi anggaran untuk sosialisasi dan BIMTEK.
- Dampak positif yang dirasakan Pemkot Bandung dalam penerapan SAP berbasis akrual terkait dengan tata kelola keuangan daerah adalah Laporan Keuangan dapat disajikan secara lebih utuh dan jelas berdasarkan data aktual.
- Opini WDP selama 5 (lima) tahun berturut-turut yang diperoleh Pemkot Bandung disebabkan masih terdapat kendala pada inventarisasi aset yang belum selesai dilakukan karena aset yang dimiliki Pemkot Bandung merupakan warisan dari Kolonial Belanda sehingga sulit dilakukan penilaian aset. Pemkot Bandung telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya dengan menetapkan NJOP dalam melakukan penilaian untuk aset-aset di bawah tahun 2005, namun untuk penilaian aset yang baru, Pemkot Bandung belum menemukan formulasi yang tepat.

Demikian Laporan perjalanan dinas ini dibuat, sebagai bahan Laporan.